

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**



**DINAS PERDAGANGAN
TENAGA KERJA KOPERASI
DAN UKM
(LAKIP TAHUN 2017)**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun kedua periode RPJMD 2016-2021. LAKIP Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas sebagai pilar dalam mewujudkan *Good Governance* dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat secara luas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan serta untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 yang telah tertuang dalam rencana strategis tahun 2016 – 2021 dan rencana kinerja tahun 2017. Penggunaan Renstra 2016-2021 sebagai acuan karena pada saat penyusunan Renja 2017 masih menggunakan Renstra tersebut demikian juga dengan DPA 2017 dan RKT 2017.

Kami harapkan laporan kinerja ini, selain dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, juga sekaligus dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini jauh dari sempurna, masukan berupa saran dan kritikan membangun sangat diperlukan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Akhirnya, kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, Februari 2018

KEPALA DINAS DAGNAKERKOP DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Gambaran Umum	1
1 Struktur Organisasi	2
2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
3 Sumber Daya Aparatur	3
B Permasalahan utama (<i>Strategic Issued</i>)	4
C Sistemaktika Penulisan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis	6
1. Visi	6
2. Misi	6
3. Tujuan dan sasaran	7
B Rencana Kinerja Tahun 2016	8
C Perjanjian Kinerja Tahun 2016	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Dinas	10
B Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Langkah ke depan	37
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Renstra	
3. Realisasi Keuangan	

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah tanggal 11 November 2016.

Yang dijelaskan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM beralamat di Jl. Syam Ratulangi No. 30 pariaman no. telp. (0751) 92105.

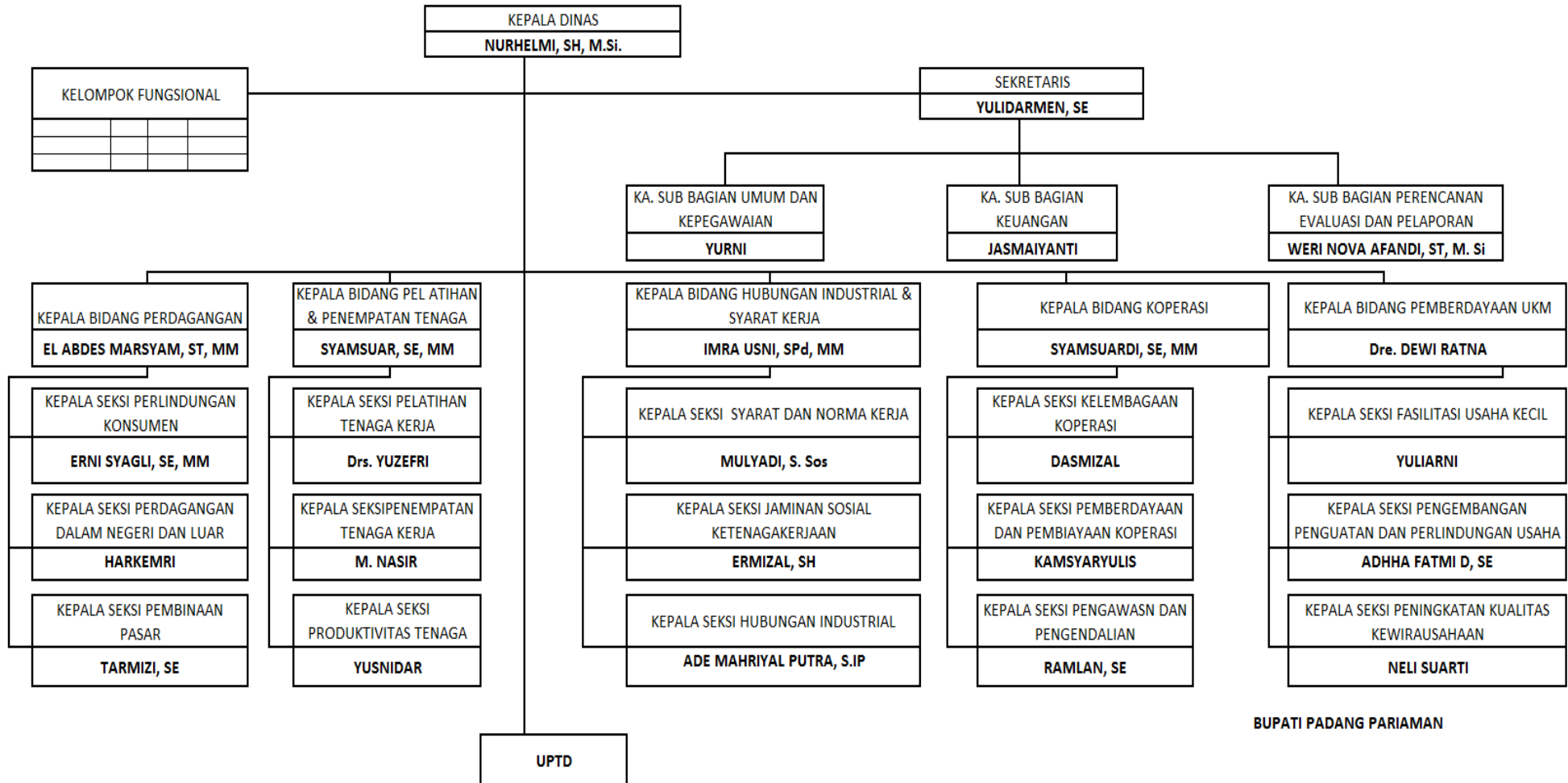
Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dan UPT terdiri dari, 1 buah eselon II , 1 (satu) eselon IIIa, 5 (lima) eselon IIIb dan 16 (enam belas) eselon IVa. Pada UPT, 1 (satu) Eselon IVa , 1 (satu) eselon IV.B

1. Struktur Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi dan pejabat Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat dilihat seperti berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Lampiran Peraturan Bupati Padang Pariaman
Nomor : 60 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016



BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 60 Tahun 2016, Dinas Dagnakerkop dan UKM mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d) pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e) pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan/ atau
- f) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pada dasarnya, untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas , Sekretariat, 5 Bidang Teknis Program yaitu dan Bidang Perdagangan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan UKM, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

3. Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan Golongan, dan Pendidikan

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
I	Komposisi Menurut Golongan	
1	Golongan IV c	1
2	Golongan IV b	3
3	Golongan IV a	6
4	Golongan III d	17
5	Golongan III c	9
5	Golongan III b	7
6	Golongan III a	1
7	Golongan II d	3
8	Golongan II c	0
9	Golongan II b	2
	Jumlah	49
I	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
1	S2 (Magister)	13
2	S1 (Sarjana)	16
3	Diploma III	3
4	SLTA/Sederajat	17
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	49

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Terdapat 16 (enam belas) isu strategis pembangunan daerah pada RRJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, dimana 5 (lima) diantaranya yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Dagnakerkop dan UKM adalah :

1. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
2. Peningkatan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
3. Kemudahan akses permodalan
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
5. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sesuai dengan Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM

Menyajikan capaian kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Dagnakerkop dan UKM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Koperindag Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 yang diterjemahkan melalui Revisi Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2016-2021. Melalui Renstra Dinas Dagnakerkop dan UKM pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Dinas Dagnekerkop dan UKM.

Untuk mencapai kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2017 Dinas Dagnakerkop dan UKM menyusun Laporan Kinerja tahun 2017 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017. Target-target kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2017

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DINAS DAGNAKERKOP DAN UKM

Visi Dinas PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah:

“TERWUJUDNYA PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, YANG BERDAYASAING”

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>“TERWUJUDNYA PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MIKRO, YANG</i>	PERDAGANGAN	Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya
	KETENAGAKERJAAN	Segala sesuatu yang terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
BERDAYASAING”		guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
	KOPERASI	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
	USAHA MIKRO	Usaha Mikro yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan kriteria kekayaan kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
	BERDAYA SAING	Kemampuan menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas yang memenuhi standar uji, mampu mengatasi perubahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar skala usaha secara simultan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal

2. MISI DINAS DAGNAKERKOP DAN UKM

Dalam mewujudkan Visi diatas maka misi dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat diuraikan seperti berikut :

1. Mewujudkan perdagangan yang berdaya saing

2. Mewujudkan ketenagakerjaan yang berdaya saing
3. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdayasaing
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dan kinerja dinas yang berdaya saing.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan perdagangan yang berdaya saing	Berkembangnya usaha perdagangan masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
	Menjaga stabilitas harga pangan pokok	Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
Mewujudkan ketenagakerjaan yang berdaya saing	Meningkatnya kesempatan kerja,	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan terciptanya penempatan, perluasan dan pelatihan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
	Terwujudnya hubungan industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Terlaksananya fasilitasi hubungan industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun
Mewujudkan Koperasi yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing Koperasi	Persentase volume usaha	Berkembangnya usaha mikro dan koperasi	Persentase Koperasi Aktif
Mewujudkan Usaha Mikro yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing Usaha Mikro (KUM)	Persentase Usaha mikro yang berdaya saing	Berkembangnya usaha mikro dan koperasi	Persentase Usaha mikro yang berdaya saing

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan kuantitatif serta berorientasi pada hasil di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 termasuk Dinas Dagnakerkop dan UKM.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,40%
2.	Meningkatnya ekspor Kabupaten Padang Pariaman	Nilai ekspor Kabupaten Padang Pariaman (juta rupiah)	23,978,288
3.	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5,71
4.	Meningkatkan penempatan, perluasan dan pelatihan kerja	Rasio Penduduk yang bekerja	70,92
		Tingkat pengangguran terbuka	7,76
5.	Terlaksananya fasilitasi hubungan industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	69,57
6.	Berkembangnya usaha mikro dan koperasi	Persentase Volume usaha Koperasi	3%
		Persentase Usaha mikro yang berdaya saing	2,60%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Dinas Dagnakerkop dan UKM. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dagnakerkop dan UKM akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM disusun pada bulan Januari 2016 dengan berdasarkan kepada Renstra Dinas Dagnakerkop dan UKM periode 2016-2021. LAKIP yang disusun ini dibuat berdasarkan Rencana Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Perjanjian kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM secara rinci disampaikan terdapat dalam lampiran 1 laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perindagkop tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1

Capaian kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,57	8,40	8,48	100,95
2	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5,50	5,71	7,53	68,13
3	Meningkatkan penempatan, perluasan dan pelatihan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,94	7,76	5,94*	130,64
4	Meningkatnya fasilitasi hubungan industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	69,52	69,57	69,57	100
5	Berkembangnya koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	-0,60	3	5,39	179,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	2	3		4	5	6
6	Berkembangnya usaha mikro	Persentase Usaha mikro yang berdaya saing	2,55	2,60	2,72	104.62

*Hasil sakernas 2015 BPS

**Indikator ini baru diadakan tahun 2017 dalam revisi Renstra

Dalam mengukur capaian kinerja menggunakan dua pendekatan, antara lain:


- 1). Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<p>Sasaran 1:</p> <p><i>Meningkatnya Usaha Perdagangan Masyarakat</i></p>
---	---

Dalam usaha untuk meningkatnya usaha perdagangan indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pasar yang kondusif (BANA) di bangun/ diperbaiki
2. Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh
3. Nilai ekspor Kabupaten Padang Pariaman (juta rupiah)
4. Jumlah UTTP yang ditera
5. Cakupan bina pedagang informal

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,57	8,40	8,48	100.95
Jumlah pasar yang kondusif (BANA) di bangun/ diperbaiki	3	2	3	150.00
Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	1	1	1	100.00
Nilai ekspor Kabupaten Padang Pariaman (juta rupiah)	21,193,006	23,978,288	23,978,288.46	100.00
Jumlah UTTP yang ditera	1.797	1.850	1.170	63.24
Cakupan bina pedagang informal	60%	63%	60%	95.23

Perhitungan PDRB kita peroleh dari publikasi BPS Kabupaten Padang Pariaman, BPS mempublikasikan nilai PDRB tahun sebelumnya pada pertengahan tahun, akibatnya data yang kita gunakan adalah data tahun sebelumnya. Sedangkan nilai ekspor Kabupaten Padang Pariaman kita kutip dari PDRB pengeluaran yang juga dipublikasikan oleh BPS. Konsep ekspor-impor menurut BPS dalam PDRB Pengeluaran adalah alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 Kontribusi PDRB sektor perdagangan cenderung fluktuatif turun naik. Tahun 2014 sebesar 8,42%, tahun 2015 sebesar 8,37% dan tahun 2016 sebesar 8,48%. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor perdagangan kontribusinya cenderung berada di kisaran delapan persen.

Pembangunan pasar di Kabupaten Padang Pariaman masih sangat tergantung dengan dan APBN. Pada tahun 2017 dilakukan pembangunan

Pasar dengan dana DAK pada 3 (tiga) lokasi yaitu Pasar Sintuk, Pasar Limau Purut dan Pasar Gasan. Sedangkan pembangunan pasar dengan dan APBD untuk penambahan los di Pasar Munggai dan Pasar Sungai Geringging.

Perusahaan ekspor di Padang Pariaman masih di dominasi oleh perusahaan Besar seperti PT. Cocomas, PT. Usaha Inti Padang, dan PT STS. Untuk penumbuhan eksportir dari pelaku usaha kecil Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Dinas Dagnakerkop dan UKM bekerjasama dengan Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat dan dan Kementerian Perdagangan RI. Dinas Dagnakerkop dan UKM selalu berpern aktif setiap pengiriman calon peserta pelatihan pengetahuan ekspor.

Nilai ekspor (juta rupiah) Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2014 samapi tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 sebesar Rp. 18.367.588,81 tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 21.193.006,34 dan tahun 2016 menjadi Rp. 23.978.288,46. Berbagai upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan mengadakan Promosi Produk Unggulan Daerah.

Pelaksanaan tera/tera ulang merupakan fasilitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Potensi UTTP yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman sekitar 14.678 unit. Pemerintah wajib mentapkan standar ukuran dan kepastuan ukuran dalam setiap transaksi perdagangan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 kewenangan tera/tera ulang dan pengawasannya ada pada pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2017 dilaksanakan tera/tera ulang terhadap 1.170 UTTP menurun dibandingkan tahun 2016 sebanyak 1.797 UTTP. Hal ini disebabkan oleh :

1. Belum terbentuknya UPTD Metrologi,
2. Pelaksanaan kegiatan Tera/tera ulang bekerjasama dengan UPTD Metrologi Pemerintah Kota Padang,
3. Kecilnya alokasi APBD untuk kegiatan tera/tera ulang,

Tabel program dan kegiatan terkait dengan peningKatan usaha perdagangan masyarakat pada tahun 2017 di Dinas Dagnakerkop dan UKM.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan terkait Sasaran 1

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisai	%
I	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Outcome : Meningkatnya tertib ukur barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen	jumlah UTTP yang ditera	1170	73
1	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP	Output : Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP	jumlah UTTP yang ditera	1170	73
2	Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi	Output : Terlaksananya dan lancarnya distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan-kecamatan sesuai aturan yang berlaku	kecamatan	17	100
3	Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian	Output : Meningkatnya pemakaian UTTP dalam usaha perdagangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan kemetrologian	kecamatan	10	60
II	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Outcome : Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Padang Pariaman	Juta rupiah	1,936,097	100
4	Membangun jejaring dengan eksportir	Output : Meningkatnya jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	orang	1	100
III	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Outcome : Terwujudnya pasar BANA	pasar	3	100
		Outcome : Cakupan bina pedagang informal	%	10	100
5	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Output : Terlaksananya penataan pengelolaan pasar nagari	pasar	1	100
6	Pengembangan pasar lelang daerah	Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan pasar lelang komoditi unggulan dan turunannya	kali	1	100
8	Pembangunan Pasar Nagari (DAK)	Output : Terlaksananya pembangunan pasar nagari yang representatif	pasar	3	100
9	Promosi Hasil Produk Daerah	Output : Terlaksananya promosi hasil produk daerah melalui pameran, dll	tahun	1	100
10	Pembangunan Pasar Nagari (APBD)	Output : Terlaksananya pembangunan pasar nagari	pasar	2	100





Sasaran 2: .

Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Perubahan harga barang kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga-harga barang akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan inflasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memantau dan menginformasikan tentang harga kebutuhan pokok. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memantau dan menginformasikan harga kebutuhan barang pokok adalah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu



Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target pada Renstra

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5,89	5,71	7,53	68.13

Rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu merupakan koefisien yang menunjukkan fluktuasi harga barang pada suatu jangka waktu tertentu di suatu daerah. Semakin tinggi koefisien berarti semakin besar fluktuasi dan disparitas harga komoditas tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan jika koefisien harga semakin kecil berarti hampir tidak terjadi gejolak perubahan harga di pasar. *Jika koefisien harga menunjukkan angka 1 (satu) berarti bahwa harga-harga komoditas pangan tidak mengalami perubahan sepanjang tahun.*

Target Koefisien 5,89 belum tercapai, berdasarkan rekaman harga kebutuhan pokok maka koefisien harga pada tahun 2017 adalah 7,53. Yang berarti bahwa terjadi gejolak harga komoditas tertentu.

Dalam hal stabilisasi harga bahan pokok, maka harga dapat dikatakan stabil jika persentase koefisien variasi harga (Standar deviasi/rata-rata x 100 persen) berada pada rentang yang wajar. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga adalah rata-rata koefisien variasi harga (persen) untuk komoditi: (1) beras; (2) gula; (3) minyak goreng; (4) terigu; (5) cabe; (6) jagung; (7) susu; (8) daging sapi; (9) daging ayam; (10) telur; (11) ikan segar; (12) mie instan

Perhitungan rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu tersebut untuk komoditi yang dipilih dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung koefisien variasi harga masing-masing komoditi yang dipilih
2. Menghitung rasio koefisien variasi harga masing-masing komoditi
3. Melakukan *simple average* terhadap rasio koefisien variasi harga untuk seluruh komoditi

Dalam perhitungan besaran indikator, perlu dijaga konsistensi jenis varian komoditi yang dijadikan objek survey, mengingat masing-masing komoditi yang dipilih masih memiliki beberapa jenis varian. Misalnya beras, dapat terdiri dari berbagai jenis beras, dan demikian juga halnya dengan komodit lainnya. Data harga komoditi yang digunakan untuk perhitungan indikator diperoleh dari hasil survey dan kunjungan ke lapangan.

Semakin kecil nilai rata-rata koefisien variasi harga, maka semakin baik kondisi stabilitas harga.


Dari pelaksanaan pada tahun 2017 diketahui bahwa rata-rata rasio koefisien harga bahan pokok sebesar 7,53. Bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi pada tahun 2017 adalah Garam beryodium sebesar 46,23% diikuti cabe merah keriting 35,885, cabe rawit 33,04%, jagung 17,83% dan Beras medium (cisokan solok) sebesar 16,35%,

Masalah yang ditemui adalah ketiadaan sarana mobilitas darat, kurangnya petugas pemantau harga dan belum tersedianya sistem informasi yang dapat menyampaikan informasi harga secara up date.

Tabel 3.5
Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran 2

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
III	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	<i>Outcome : Terwujudnya pasar BANA</i>	<i>pasar</i>	3	100
		<i>Outcome : Cakupan bina pedagang informal</i>	%	10	100
7	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	output : tersedianya data harga sembako dan bahan kebutuhan pokok	tahun	1	100

		
Monitoring pupuk bersubsidi	Tera/Tera ulang UTTP	Pembinaan pedagang

	<p>Sasaran 3:</p> <p><i>Meningkatnya penempatan, perluasan dan pelatihan kerja</i></p>
---	--

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Dagnakerkop dan UKM terus bertekad untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai implementasi Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran maka Dinas Dagnakerkop mewujudkannya dengan upaya meningkatnya penempatan, perluasan dan pelatihan kerja.

Tabel 3.6
Capaian kinerja terkait Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
Rasio Penduduk yang bekerja	74,72	70,92	74,72	105.36
Pencari kerja yang terdaftar	2.487	3.800	3.807	100.18
Pencari kerja yang ditempatkan	1.260	2.200	2.283	104.61
Tingkat pengangguran terbuka	5.94	7,76	5,94*	130.64

Secara umum target yang ditetapkan dapat dicapai sampai 100%. Rasio penduduk yang bekerja berhasil dicapai sebesar 71,05%. Calon tenaga kerja yang mendaftar di Dinas Dagnakerkop dan UKM sebanyak 3.807 orang melebihi target sebesar 3.800 orang. Pendaftaran pencari kerja dilaksanakan di BKOL (Bursa Kerja On Line). Tetapi realitasnya pendaftaran tenaga kerja masih secara manual. Diperburuk lagi dengan kondisi ruangan pelayanan yang tidak representatif. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur berbasis internet untuk mendaftarkan tenaga kerja. Fasilitas yang online di BKOL baru pelaporan ke Kementerian Tenaga Kerja yang tersedia aplikasinya sedangkan pendaftaran tenaga kerja masih manual.

Data tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) bersumber dari BPS Kabupaten Padang Pariaman yang dipublikasikan setiap tahun. BPS baru mempublikasikan Buku Padang Pariaman dalam angka pada pertengahan tahun, sedangkan LAKIP sudah harus diselesaikan pada awal tahun. Sehingga data yang digunakan adalah data yang telah dipublikasikan oleh BPS yakni data tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 adalah 5,94. Angka ini sama dengan tahun 2015 karena BPS tidak melaksanakan Sakernas pada tahun 2016. Dibandingkan dengan target TPT tahun 2017 sebesar 7,76 maka realisasi tahun 2017 lebih tinggi dari target sebesar 130,64%. Realisasi ini menunjukkan bahwa usaha-usaha Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka pengangguran cukup berhasil.

Berikut data dan informasi terkait penempatan tenaga kerja di Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2017 :

A. Pencari Kerja yang terdaftar pada akhir tahun lalu

- a. Laki-laki : 1468 orang
- b. Perempuan : 2339 orang
- Total : 3807 orang

B. Pencari Kerja yang di tempatkan akhir tahun lalu

- a. Laki- laki : 997 orang
- b. Perempuan : 1.288 orang
- Total : 2.285 orang

A. Pelatihan Menjahit 1 Paket di Padang Sago dengan Peserta 16 orang

B. Pelatihan di BLK Pada tahun 2017 sebanyak 9 Paket dengan rincian sebagai berikut:


No	Jurusan Pelatihan	Jumlah	Volume	Jumlah Peserta	
				Laki- laki	Perempuan
1	Menjahit	1	Paket	-	16
2	Sepeda Motor	1	Paket	16	-
3	Mobil Bensin	1	Paket	16	-
4	Listrik	2	Paket	10	12
5	AC	1	Paket	16	-
6	Audio Visual/ Elektro	1	Paket	13	3
7	Basic Office / Komputer	1	Paket	2	14
8	Processing	1	Paket	-	16
Total Peserta Pelatihan BLK Tahun 2017				93	51
144 orang					

Tabel 3.7
Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran 3

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
I	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Outcome : tingkat pengangguran terbuka	%	6,48*	
1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Output : Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat yang memasuki dunia kerja	Paket	2	100
2	Program Peningkatan	Outcome : Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	31	100

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
	Kesempatan Kerja				
3	Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja	Output : Terlaksananya pelayanan tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja online	bulan	12	100
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Output : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	8	65
		Outcome : Jumlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)	Dokumen	15	100
		Outcome: Jumlah Lembaga bipartit	Dokumen	7	100
		Outcome : Berfungsinya Lembaga tripartit	buah	1	100
		Outcome : Jumlah Peraturan Perusahaan		25	100
9	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Output : Terlaksananya fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	tahun	1	1
10	Peningkatan Pengawasan , Perlindungan , Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Output : Dipatuhinya norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	tahun	1	1

		
BKOL	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelatihan di BLK

	<p>Sasaran 4:</p> <p><i>Meningkatnya fasilitasi hubungan industrial</i></p>
---	---

Hubungan industrial adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Dagnakerkop dan UKM melaksanakan fasilitasi hubungan industrial dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif bagi buruh dan pengusaha. Kedua pihak terjamin hak-hak mereka sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Meningkatnya kenyamanan tenaga kerja dalam bekerja, dan dipetakannya kerawanan Hubungan industrial pada tingkat perusahaan di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan menambah wawasan pekerja dan pengusaha tentang hubungan industrial.

Penyediaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja, melalui deteksi dini tingkat kerawanan hubungan industrial di perusahaan serta tersosialisasikannya peraturan tentang syarat kerja dan hubungan industrial. terselesaikannya kasus-kasus hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Lembaga Bipartit dan Lembaga tripartit.

Menjamin terlaksananya perlindungan ketenagakerjaan melalui keanggotaan di BPS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan terpenuhinya standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tabel 3.8
Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran 4

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Output : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	8	65
		Outcome : Jumlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)	Dokumen	15	100
		Outcome: Jumlah Lembaga bipartit	Dokumen	7	100
		Outcome : Berfungsinya Lembaga tripartit	dokumen	25	100
		Outcome : Jumlah Peraturan Perusahaan		25	100
9	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Output : Terlaksananya fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	tahun	1	1
10	Peningkatan Pengawasan , Perlindungan , Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Output : Dipatuhinya norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	tahun	1	1

Indikator kinerja kunci padameningkatnya fasilitasi hubungan industrial adalah :

1. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun
2. Besaran buruh yang menjadi anggota Jamsostek
3. Perlindungan dan keselamatan

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasarn 4

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	121,74	69,57	69,57	100.00
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63,20%	64,50%	65,00%	100.77%
Keselamatan dan Perlindungan	58,26%	62%	58.26%	93.96%

Pencapaian indikator Kinerja diatas dapat dijelaskan dengan data berikut :

- a. Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun

$$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000 = \frac{8}{115} \times 1000 = 69,57$$

- b. Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

$$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh anggota Jamsostek}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100\% = \frac{11.978}{18.429} \times 100\% = 65,0\%$$

- c. Keselamatan dan perlindungan

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yanag menerapkan K3 pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n}} \times 100\%$$

$$\frac{67}{115} \times 100\% = 58,26\%$$

Dokumentasi kegiatan :



Dokumentasi kegiatan Bidang Hubungan Industrial



Sasaran 5:

Berkembangnya usaha mikro dan koperasi

Dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal maka pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Dagnakerkop dan UKM bertekad meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan prioritas dan fasilitas kepada Koperasi dan UKM. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Peningkatan Persentase Volume Usaha Koperasi
2. Persentase Usaha Mikro yang berdayasaing

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Gerakan Koperasi (Dekopinda Kabupaten Padang Pariaman) dan berbagai pemangku kepentingan.

Persentase Volume Usaha Koperasi



Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Volume Usaha Koperasi

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
Persentase Koperasi Aktif	75,60	60,00	60,65	100.23
Koperasi sehat	30	30	30	100.00
Persentase Volume usaha koperasi	-0,60%	3%	5,97	199.00

Koperasi aktif adalah Koperasi yang pengurus, kantor/domisili dan aktivitasnya masih berlangsung. Pada tahun 2016 terdapat 248 unit Koperasi dimana 189 unit diantaranya merupakan Koperasi aktif.

Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 65/Kep/M.KUMKM.2/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembubaran Koperasi, terdapat 36 Koperasi di Kabupaten Padang Pariaman yang badan hukumnya dicabut.

Pada tahun 2017 setelah dikurangi Koperasi yang dicabut badan hukum, maka jumlah Koperasi menjadi 216 unit. Dengan Koperasi aktif berjumlah 131 unit dan Koperasi tidak aktif 85 unit. Persentase Koperasi aktif adalah 61% atau 79% dari target sebesar 75,75%. Hal ini disebabkan semakin sulitnya Koperasi mengembangkan usaha karena persaingan dunia usaha yang semakin ketat, tingginya kredit macet dari anggota, dan kurangnya bantuan dari Pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan Koperasi.

Tabel 3.12
Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran 5

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Outcome : meningkatnya Koperasi yang mampu membuat laporan secara mandiri	%	5	100%
1	Pelatihan Akuntansi Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi dan LKM Non Koperasi	output : terlaksananya pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus Koperasi dan LKM non Koperasi	orang	25	100%
2	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Output : Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	orang	25	100%
II	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Outcome : meningkatnya pengawasan administrasi pengelolaan Koperasi	Koperasi	20	100%
3	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Output : terlaksananya pengawasan terhadap KUMKM yang menggunakan dana pemerintah dan non pemerintah	Koperasi	30	100%
4	Pembinaan dan Penilaian Kesehatan	Output : Terlaksananya penilaian terhadap simpan	Koperasi	30	100%

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
	Simpan Pinjam	pinjam Koperasi			
III	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Outcome : Persentase Koperasi aktif	%	75,76	100%
		Outcome : Persentase peningkatan Volume usaha Koperasi	%	5,39	199%
5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Output : terlaksananya pengawasan, pembinaan, dan pemberian penghargaan terhadap Koperasi berprestasi	Koperasi	30	100%
6	Revitalisasi Koperasi tidak aktif dan belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Output : Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Koperasi	5	100%

Tabel 3.13
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Koperasi	234	240	248	216
2	Jumlah Koperasi Baru	4	5	1	1
2	Jumlah Koperasi Aktif	174	180	189	131
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	60	60	59	85
4	Persentase Koperasi Aktif	74.36%	75.00%	76.21%	60.65%
5	Jumlah Koperasi unit usaha simpan pinjam yang sehat	42	46	50	30
6	Jumlah Koperasi yang RAT	62	60	49	50
7	Volume Usaha Koperasi (Rp.000)		159,724,649	158,769,039	167,326,056
	Pertumbuhan volume usaha Koperasi			-0.60%	5.39%
8	Jumlah Anggota Koperasi	24,464	24,967	25,205	24,777



Persentase usaha mikro dan kecil



Tabel 3.14
Capaian kinerja tahun 2017

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
Persentase Usaha mikro yang berdaya saing	2,70	2,72	2,87	104.62
Persentase Usaha Mikro Kecil	97,56	97,46	97,22	99,75

Defenisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dengan kriteria kekayaan kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Kecil yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ketersediaan data tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Padang Pariaman masih diperdebatkan. Jumlah usaha mikro dan kecil yang bisa

dijadikan acuan adalah hasil sensus ekonomi tahun 2006 yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut data BPS jumlah UMKM di Kabupaten Padang Pariaman adalah 42.230 unit usaha yang terdiri atas 37.484 usaha mikro, 4.564 unit usaha kecil dan 182 unit usaha menengah.

Menurut Dinas Dagnakerkop dan UKM total UMKM di Kabupaten Padang Pariaman adalah 11.656 dimana 11.331 atau 97,21% termasuk kategori usaha mikro dan kecil. Terdapat peningkatan jumlah usaha mikro dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 11.297 unit usaha. Hal ini dapat diartikan bahwa

1. Kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausaha semakin baik
2. Kondisi perekonomian semakin kondusif untuk berwirausaha
3. Semakin terbuka peluang berusaha.

Tabel 3.15

Usaha Mikro di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Usaha Mikro Kecil	Usaha Menengah Besar	Total
1	Batang Anai	855	57	912
2	Lubuk Alung	927	52	979
3	Sintuk Toboh Gadang	591	14	605
4	Ulakan Tapakis	370	19	389
5	Nan Sabaris	607	20	627
6	2x11 Enam Lingkung	512	25	537
7	Enam Lingkung	851	21	872
8	2x11 Kayu Tanam	415	23	438
9	VII Koto Sei. Sarik	714	16	730
10	Patamuan	671	8	679
11	Padang Sago	749	9	758
12	V Koto kampung Dalam	632	17	649
13	V Koto timur	781	5	786
14	sungai Limau	759	14	773
15	Batang Gasan	559	7	566
16	Sungai Geringging	948	13	961
17	IV Koto aur Malintang	390	5	395
	Total	11,331	325	11,656

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Satuan	Realisasi	%
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Outcome : meningkatnya Koperasi yang mampu membuat laporan secara mandiri	%	5	100%
1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM	output : Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	orang	25	100%
III	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Outcome : Persentase Koperasi aktif	%	75,76	100%
		Outcome : Persentase peningkatan Volume usaha Koperasi	%	5,39	199%
2	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Output : terlaksananya pertemuan pelaku Usaha Mikro dengan Pengusaha	orang	25	100%



B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan besarnya anggaran, realisasi anggaran dan realisasi fisik dari segenap kegiatan yang ada pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman, sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan. Dimana secara keseluruhan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 96,25%, realisasi belanja tidak langsung sebesar 96,75% dan belanja langsung sebesar 96,01%. Sedangkan

realisasi fisik kegiatan semuanya terlaksana atau 103%. Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Tahun 2017

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		PISIK	KEUANGAN	%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	116,102,400		115,483,100	99.47
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	116,102,400	100	115,483,100	99.47
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	33,008,426		32,583,800	98.71
Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja	33,008,426	100	32,583,800	98.71
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50,430,000		42,662,500	84.60
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	25,000,000	100	18,485,000	73.94
Peningkatan Pengawasan , Perlindungan , Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	25,430,000	100	24,177,500	95.07
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	107,500,000		107,082,438	99.61
Pelatihan Akuntansi Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi dan LKM Non Koperasi	30,000,000	100	29,931,000	99.77
Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM	47,500,000	100	47,420,438	99.83
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	30,000,000	100	29,731,000	99.10
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	75,000,000		67,332,000	89.78
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	30,000,000	100	27,421,000	91.40
Pembinaan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam	45,000,000	100	39,911,000	88.69
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	85,000,000		77,049,000	90.65

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		PISIK	KEUANGAN	%
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	30,000,000	100	25,364,000	84.55
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	30,000,000	100	29,355,000	97.85
Revitalisasi Koperasi tidak aktif dan belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	25,000,000	100	22,330,000	89.32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	517,000,000		487,759,932	94.34
Penyediaan jasa surat menyurat	46,500,000	100	46,492,800	99.98
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74,000,000	100	50,189,414	67.82
Penyediaan jasa administrasi keuangan	168,500,000	100	163,910,200	97.28
Penyediaan jasa kebersihan kantor	22,000,000	100	21,967,000	99.85
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	100	4,930,000	98.60
Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	100	39,970,897	99.93
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	127,000,000	100	126,874,550	99.90
Operasional UPT Metrologi	9,000,000	100	8,514,000	94.60
Operasional UPTD Balai Latihan Kerja	25,000,000	100	24,911,071	99.64
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183,700,000		180,575,388	98.30
Pengadaan peralatan gedung kantor	7,000,000	100	6,930,000	99.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,600,000	100	39,375,100	96.98
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	121,100,000	100	119,271,088	98.49
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000	100	14,999,200	99.99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37,000,000		36,999,828	100.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	37,000,000	100	36,999,828	100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000		39,960,000	99.90
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	40,000,000	100	39,960,000	99.90
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	74,000,000		72,763,100	98.33
Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP	40,000,000	100	39,784,700	99.46
Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi	20,000,000	100	19,672,000	98.36
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3,433,010,000		3,048,510,745	88.80
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	52,000,000	100	26,079,010	50.15

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		PISIK	KEUANGAN	%
Pengembangan pasar lelang daerah	850,000	0	850,000	100.00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	20,000,000	100	10,341,600	51.71
Pembangunan Pasar Nagari (DAK)	2,820,660,000	100	2,478,158,210	87.86
Promosi Hasil Produk Daerah	180,000,000	100	179,715,925	99.84
Pembangunan Pasar Nagari (APBD)	359,500,000	100	353,366,000	98.29
	4,776,750,826		4,308,761,831	90.20

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menjelaskan faktor faktor tercapai, faktor pendukung dan faktor penghambat ketidak berhasilan tercapainya indikator kinerja. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain:

1. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, walaupun dengan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada.
2. Sasaran kesatu, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB realisasi 8,48% dari target sebesar 8,40 atau dengan capaian 100,95%. Faktor pendukung adalah semakin kondusifnya iklim perdagangan, sarana perdagangan semakin baik, kontribusi swasta/masyarakat semakin meningkat, dan infrastruktur perhubungan semakin baik. Faktor yang menghambat diantaranya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana perdagangan, konflik pengelola pasar rakyat,
3. Sasaran kedua, rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh rata-rata koefisien sebesar 7,53 atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 5,71. Dapat disimpulkan capaian yang diraih sebesar 68,13 persen. Hal ini disebabkan karena ada beberapa bahan pangan yang mengalami lonjakan dan fluktuasi harga cukup besar yaitu garam, cabe, jagung dan beras. Juga karena data yang

dikumpulkan berasal dari beberapa Pasar Rakyat yang berbeda sehingga antar satu pasar dengan pasar lainnya terdapat deviasi yang cukup besar.

4. Sasaran ketiga yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,94 persen jauh melaampaui target sebesar 7,76%. Capaian ini berhasil diraih karena semakin terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwira usaha. Kekurangan hasil ini adalah data tersebut bersumber dari Sakernas tahun 2015, karena BPS tidak melaksanakan Sakernas pada tahun 2016.
5. Sasaran keempat yaitu angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Realisasi sebesar 69,57% dari target sebesar 69,57 atau capaian yang diraih adalah sebesar 100%. Faktor pendukungnya adalah budaya musyawarah untuk mufakat dimana ketika terjadi perbedaan antara pengusaha dengan pekerja maka cara pertama yang dilakukan adalah melalui musyawarah sehingga berbagai kasus dapat diselesaikan dengan pemufakatan. Faktor penghambat adalah kurangnya SDM untuk melakukan deteksi dini kasus-kasus hubungan industrial.
6. Sasaran kelima, persentase peningkatan volume usaha Koperasi terjadi peningkatan sebesar 5,39 persen atau 179,63% lebih besar dari target sebesar 3%. Dan lebih tinggi dari capaian tahun 2016 yang tumbuh negatif sebesar -0.60%. Faktor pendukung utama adalah semakin berkembangnya Koperasi Pegawai Negeri dengan peningkatan pada unit usaha simpan pinjam. Faktor penghambat adalah Koperasi yang ada pada masyarakat khususnya Koperasi Produksi kurang berkembang, disebabkan antara lain persaingan usaha yang semakin ketat, terbatasnya sumber daya yang dimiliki Koperasi, dan kurangnya bantuan dan binaan dari pemerintah,
7. Sasaran keenam, Persentase usaha mikro yang berdaya saing. Usaha mikro yang berdaya saing adalah usaha mikro yang telah memiliki registrasi seperti sudah memiliki izin usaha, SIUP, PIRT dan lain-lain.

Kesadaran pelaku usaha semakin tinggi untuk meregistrasikan usaha mereka, sehingga memudahkan untuk mengakses penambahan modal khususnya dari perbankan.

8. Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Dagnakerkop tahun 2017 sebesar 90,20% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Hal ini disebabkan anggaran sisa lelang pengadaan pembangunan Pasar Rakyat tidak bisa dimanfaatkan. Karena masa transisi sistem keuangan DAK yang harus dibuat pengusulan sebelum 31 Agustus 2017. Sedangkan teknis di lapangan belum bisa menentukan pemanfaatan dana sisa tersebut.

B. LANGKAH KE DEPAN

Tuliskan yang terkait dengan rencana aksi 2018

1. Dengan sistem pencairan non-tunai kita harapkan bahwa realisasi anggaran akan lebih efisien dan tepat waktu.
2. Sasaran kesatu, untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB maka faktor pendukung berupa tersedianya kebijakan pemerintah terkait iklim perdagangan, sarana perdagangan semakin baik, kontribusi swasta/masyarakat semakin meningkat, dan infrastruktur lalulintas harus semakin baik. Faktor yang menghambat diantaranya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana perdagangan, konflik pengelola pasar rakyat perlu ditindaklanuti dan diantisipasi,
3. Sasaran kedua, rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu. Perlu antisipasi terhadap berbagai kondisi yang mempengaruhi harga bahan pokok dan tindakan untuk mengatasinya. Koordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Pertanian, Bulog juga harus lebih ditingkatkan.
4. Sasaran ketiga yaitu tingkat pengangguran terbuka. Perlu kerjasama lintas OPD karena penciptaan lapangan kerja terkait dengan banyak sektor. Baik ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya.

5. Sasaran keempat yaitu angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Terkait dengan perubahan kewenangan pada pemerintah daerah maka perlu inovasi pada tindakan, seperti perlunya deteksi dini kasus-kasus hubungan industrial.
6. Sasaran kelima, persentase peningkatan volume usaha Koperasi. Koperasi yang semakin berkembang saat ini adalah Koperasi Pegawai Negeri khususnya Koperasi guru-guru. Perlu penekanan pembinaan pada Koperasi non-pegawai. Koperasi pasar, Koperasi produksi, Koperasi pertanian, dan Koperasi nelayan harus lebih diberi prioritas pembinaan,
7. Sasaran keenam, Persentase usaha mikro yang berdaya saing. Usaha mikro yang berdaya saing adalah usaha mikro yang telah memiliki registrasi seperti sudah memiliki izin usaha, SIUP, PIRT dan lain-lain. Kesadaran pelaku usaha semakin tinggi untuk mendaftarkan usaha mereka, sehingga memudahkan untuk mengakses penambahan modal khususnya dari perbankan.
8. Perlu peningkatan SDM aparatur, dukungan sarana dan prasarana mobilitas serta ketersediaan anggaran yang cukup untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Daganakerkop dan UKM pada tahun 2018 ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2017.

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita semua dan menjadikan segala upaya yang telah kita laksanakan menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman khususnya serta bangsa dan negara.